



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AIDA SUWANDI BUDIMAN
2. Jabatan : DEPUTI GUBERNUR
3. NHK : 189167

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 15.830.000.000

1. Bangunan Seluas 56.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.355.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.225.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/119 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.195.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MICRO/MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ MOBILPENUMPANG Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.645.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 326.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 5.036.355.538

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.731.876.883

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 37.119.232.421

III. HUTANG

Rp. 2.640.657.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 34.478.575.421

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.